



BKSDA Bantah Dua Polhut Terlibat Pencurian Kayu

★ Polisi Nyatakan Tetap Bersalah

SINGARAJA, NusaBali

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Bali, membantah terkait dengan kasus penangkapan dua oknum polisi hutan yang dinyatakan terlibat dalam pencurian kayu, di hutan lindung Tamblingan, Rabu (27/5) malam lalu. Menurut BKSDA tindakan penangkapan dua oknum polisi hutan tersebut oleh pihak kepolisian dinilai sangat berlebihan, karena saat itu keduanya disebut tengah melaksanakan tugas pengamanan barang bukti pencurian kayu di hutan lindung Tamblingan.

Terlebih dalam keterangan yang diberikan pihak KSDA dalam siaran persnya, mengatakan bahwa penugasan kedua oknum yang berinisial MS dan MRS tersebut telah mengantongi Surat Perintah Tugas (SPT) dari Kepala Balai KSDA Bali. Dengan Nomor PT.109/BKSDA.BL-1/LIN/2015 tanggal 8 Mei 2015 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Mei 2015.

Selain itu juga ditunjukkan Laporan Kejadian Nomor LK.05/BKSDA.BL-2/R. BKH/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan Berita Acara Temuan Barang Bukti Nomor BA.12/BKSDA.BL-1/LIN/2015 tanggal 23 Maret 2015. "Apabila ada statement dari pihak Polres Buleleng yang menyatakan bahwa kayu tersebut akan dibawa ke mess untuk kemudian dijual adalah statement yang prematur, mengada-ada, tidak sesuai akal sehat dan tidak didukung dengan fakta-fakta dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan maupun saksi-saksi," ujar Kepala BKSDA Bali, Istanto,

Jumat (29/5).

Sementara Kapolsek Banjar Kompol Hendrik Pradinata, dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya penyangkalan yang dilakukan dari pihak BKSDA. Namun menurutnya, kedua oknum yang saat operasi penangkapan tidak dapat menunjukkan kelengkapan administrasi tetap dinyatakan bersalah.

"Siapa saja boleh melakukan penyangkalan sebagai pembelaan. Tetapi saat penangkapan kedua oknum tersebut memang tidak bisa menunjukkan kelengkapan administrasi kepada kami, sehingga akhirnya diproses. Hal tersebut dinyatakan sudah menyalahi aturan dan pihaknya sudah mengakui hal itu," ujar Kompol Hendrik.

Ia pun menjelaskan bahwa kalau memang ada surat penugasan dan kelengkapan administrasi lainnya, semuanya bersifat melekat. Dalam artian harus tetap dibawa oleh yang bersangkutan dalam menjalankan tugas. "Kalau memang ada kelengkapan administrasinya harus serta merta melekat. Kalau administrasinya belum lengkap ya jangan melakukan aksi dulu," imbuh dia.

Pihaknya mengaku sampai saat ini tetap akan memproses kasus tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemanggilan saksi ahli dari Dinas Kehutanan dan juga dari BKSDA akan segera dilakukan. Sehingga penetapan bersalah atau tidaknya kedua oknum yang tidak membawa surat-surat saat penugasan akan dilakukan oleh ahli. **k23**

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 4



Radar Bali

Bulog Hanya Serap 961 Ton

Dipicu Harga Beras di atas HPP

DENPASAR- Badan Urusan Logistik (Bulog) Devisi Regional Bali, sampai dengan Kamis (28/5) hanya mampu menyerap sebanyak 961 ton beras lokal Bali dari target tahun 2015 yang jumlahnya sebanyak 5.000 ton. Hal ini karena beras Bali kualitas medium di pasaran harganya di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yang besarnya Rp 7.300 per kilogramnya. "Kami tetap berusaha untuk bisa membeli produk lokal. Sesuai dengan HPP tapi harga di pasaran di atas HPP dan itu merupakan hal yang baik untuk para petani," ujar Kepala Bulog Devisi Regional Bali, I Wayan Budita di Kantor Perum Bulog Divre Bali Jalan Raya Puputan Nomor 35, Renon, Jumat (29/5).

Menurut Budita, hingga saat ini Bulog Bali belum dapat menyer-

ap gabah dari para petani lokal Bali. Sebab petani lebih senang menjual dalam rupa beras ketimbang gabah. "Kalau berupa beras, petani bisa mendapatkan katulnya, serta sekamnya. Artinya turunannya itu bisa diman-

faatkan atau dijual," jelasnya.

Ketika disinggung masih banyaknya petani yang belum mengetahui jika para petani bisa menjual gabah atau berasnya ke Bulog, Budita mengatakan para petani seharusnya sudah mengetahui



DOK. RADAR BALI

BELUM OPTIMAL: Tumpukan beras di gudang Bulog Renon, di mana hingga Mei ini baru terserap 961 ton.

bahwa bisa menjual beras atau gabahnya ke Bulog.

Sebab pihak Bulog Bali telah menginformasikan terkait hal tersebut tidak hanya melalui media, namun juga melalui Badan Pembina Desa (Babinsa). "Kami sudah sampaikan, lewat pertemuan di Kodam. Kemudian setiap ada acara di lapangan, kami juga sudah sampaikan. Kami juga sudah pasang spanduk di gudang-gudang Bulog," ungkapnya.

Lebih lanjut, Budita mengatakan jika upaya Bulog Bali untuk memberikan informasi terkait petani bisa menjual beras dan gabahnya di Bulog lebih dari yang dilakukan pada tahun 2014. Selain itu, ada sekitar delapan orang sat gas yang memantau harga gabah dan beras para petani di seluruh Bali. "Kita juga melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sangat berkepentingan dengan harga beras dan gabah. Tidak boleh

harganya sampai jatuh," jelasnya.

Budita menambahkan Pemerintah Daerah memiliki Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) yang ditugaskan pemerintah daerah untuk membeli gabah petani dengan harga sama atau di atas HPP. "Seperti saat kami mendengar ada harga di bawah HPP kami dan PERPADI sama-sama turun," ujarnya.

Budita berharap para petani bisa menjaga kondisi gabahnya dengan baik sehingga harganya pun lebih bagus juga. Selain itu, dia juga mengharapkan peran serta seluruh kalangan masyarakat untuk menginformasikan jika gabah atau beras petani dengan kualitas medium dijual dengan harga di bawah HPP. "Kalau harganya dibilang jatuh, lebih baik diteliti dulu. Sebab waktu itu dikatakan gabah di Klungkung harganya jatuh. Ternyata gabahnya basah dan kebanyakan yang kosong," ungkapnya. (ayu/rid)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 21



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

Kabel Berserakan di Imam Bonjol

ENTAH kabel milik siapa. Tapi, yang jelas kabel ini berserakan di atas trotoar. Menurut warga sekitar, kabel ini pernah ada yang mengerjakan namun semenjak beberapa bulan ini kondisinya dibiarkan begitu saja dan ditinggalkan. Proyeknya tak jelas. Sangat mengganggu pejalan kaki dan syukurnya tak dicuri. (ian/yes)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 21



Oknum Kepala Dinas "Digerebek" Satpol PP

Berada di Rumah Pegawai Berinisial DU

GIANYAR - Nasib apes sepertinya tengah dialami oknum Kadis di Pemkab Gianyar berinisial GB bersama seorang pegawai perempuan berinisial DU. Sebab, sore kemarin (29/5) sekitar pukul 16.30 saat keduanya tengah berada di sebuah rumah yang berada di sisi timur Stadion Dipta, Buruan, didatangi anggota Satpol PP Pemkab Gianyar. Kondisi ini kontan membuat geger, terlebih muncul dugaan keduanya tepergok berselingkuh.

Pantauan di kantor Satpol PP hingga malam kemarin menunjukkan beberapa personel Satpol PP memang enggan untuk memberikan keterangan ke awak media yang mendatangi kantor tersebut ■

► Baca *Oknum...* Hal 35

Mengaku Ditawari Makan oleh Perempuan Berinisial DU

■ OKNUM...

Sambungan dari hal 21

Meski banyak beberapa di antaranya tampak kasak-kusuk.

Sekitar pukul 18.00 Kasat Pol PP I Gede Daging pun datang ke kantornya. Namun, tak banyak yang disampaikan pria ini dan langsung masuk ke dalam kantornya diikuti beberapa anggotanya yang sore itu tengah berjaga.

Berselang pukul 18.20, GB dengan dibonceng seseorang yang menunggangi sepeda motor jenis matic pun tiba di kantor Satpol PP. Terlihat dari salah satu warung depan kantor Satpol PP, GB langsung memasuki ruang Kasatpol PP dengan terburu-buru. Sekitar 25 menit GB dan Gede Daging berada di ruangan tersebut. Pasanya sekitar pukul 18.45, GB yang menggunakan baju biru terlihat keluar dan langsung meninggalkan kantor Satpol PP yang berada di Jalan Manik, Gianyar.

Dikonfirmasi mengenai informasi, itu I Gede Daging belum berani memberikan keterangan lebih lengkap. Sebab menurutnya semua itu masih praduga tak bersalah.

"Ini praduga tak bersalah. Saya sudah sampaikan ke atasan. Tapi, pimpinan masih berada di luar daerah. Jadi, saya *no comment*. Senin (lusa, Red) saya baru bisa bilang," katanya singkat. Lantas, kenapa GB ini datang ke kantor Satpol PP malam kemarin? Bahkan, secara tertutup melakukan pertemuan dengan dirinya. "Saat ini saya belum berani komentar apa," jawabnya pendek.

Sementara itu, dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya kepada awak media, GB langsung membantahnya. Sebab, dia merasa tidak ada hubungan spesial antara dirinya dengan perempuan tersebut.

"Tidak ada itu. *Pang selamat, sing ade keto* (biar selamat, tidak ada itu, Red)," jawabnya sambil bersumpah.

Dalam klarifikasinya itu, dia juga siap untuk divisum jika ada pihak yang menuduh dirinya telah melakukan tindakan seperti informasi tersebut. "Kalau mau silakan visum. Karena saya tidak berbuat apa-apa," tegasnya lagi.

Dalam kesempatan kemarin, dia juga menyampaikan mengenai kronologi hingga dia harus berurusan dengan Satpol PP. Dijelaskan olehnya kemarin awalnya dia tengah berolahraga. Usai berolahraga, secara kebetulan dia bertemu dengan DU. Saat itu *lah* DU dia katakan menawari dirinya makan.

"Itu kebetulan, dan dia *nanjenin* (menawari) makan. Lalu, saya ke tempatnya. Saat saya baru sampai di halaman rumah, datang Satpol PP. Jadi, tidak ada itu (perselingkuhan, Red). Tidak ada itu saya di dalam kamar," jawabnya saat ditanya posisinya saat anggota Satpol PP tiba.

Disinggung mengenai lokasi di mana tempat tersebut, dia merinci jika lokasinya ada di daerah sisi timur Stadion Dipta. Dia juga menyebutkan jika rumah tersebut merupakan milik DU. "Saya tegaskan lagi, saya siap divisum. Karena memang tidak ada apa-apa. Satu lagi, saat itu saya di halaman (rumah), tidak ada itu di dalam kamar," tegasnya. (wid/yes)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 21 x 35



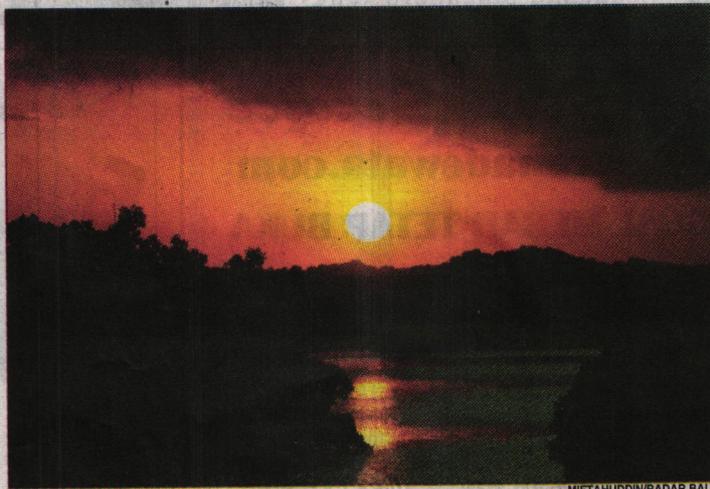
Radar Bali

Walhi Tolak Tukar Guling Pulau Pudut

DENPASAR - Rencana Dinas Kehutanan Provinsi melakukan tukar guling terhadap Pulau Pudut dari kawasan Tahura Ngurah Rai mengundang protes dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali. Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Walhi Bali, Suriadi Darmoko, Jumat kemarin (29/5).

Suriadi menjelaskan bahwa Walhi belum sama sekali memberikan tanggapan pasca presentasi

► Baca *Walhi...* Hal 35



MIFTAHUDDIRADAR BALI

KAWASAN TAHURA: Kawasan Tahura Ngurah Rai terus terancam menyusul rencana tukar guling Pulau Pudut yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Bali.

Diduga untuk Muluskan Rencana Reklamasi

■ WALHI...

Sambungan dari hal 21

yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutan mengenai tukar guling wilayah. "Kami dari Walhi Bali sama sekali belum memberikan tanggapan, sebab kami baru menerima materi yang dibahas pada saat itu juga (saat sosialisasi Rabu 27/5). Jadi kami belum bisa mempelajari secara lebih komprehensif presentasi yang disampaikan oleh Dinas Kehutanan," paparnya.

Sambil menjelaskan peta

kondisi Pulau Padut yang akan ditukar dari kawasan Tahura, Suriadi menjelaskan persepsi mereka mengenai presentasi dan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan adalah dalam rangka untuk melakukan penghapusan atau mengeluarkan Pulau Pudut dan sekitarnya yang seluas 169,95 hektare dari kawasan hutan. "Dalam Perpres 51 tahun 2014 sebagian Kecamatan Kuta Selatan termasuk Pulau Pudut adalah sebagai zona penyangga yang masih ditetap-

kan sebagai Taman Hutan Raya Ngurah Rai," ucapnya.

Bagi Walhi mengenai rencana tukar guling kawasan Pulau Pudut dan sekitarnya dengan kawasan di luar dari kawasan hutan hanyalah cara untuk menghilangkan dau menghapus status Pulau Pudut dan sekitarnya dari kawasan hutan. "Oleh karena itu, tukar menukar tersebut bagi kami hanyalah upaya menghapuskan Pulau Pudut dari kawasan Tahura. Ini upaya untuk memuluskan rencana reklamasi Teluk Bena," ucap Suriadi.

Menurutnya, berdasarkan perpaduan antara masterplan rencana reklamasi Teluk Bena oleh PT. TWBI dengan peta lampiran 1 Perpres 51 tahun 2014 ditemukan fakta bahwa sebagian rencana reklamasi Teluk Bena masuk ke area kawasan hutan. "Jikapun Dinas Kehutanan Provinsi Bali akan melakukan tukar menukar kawasan antara kawasan hutan di Pulau Pudur dan sekitarnya yang tidak ditumbuhi oleh mangrove, maka kami memandang hal tersebut tidak perlu dilakukan," ucap Suriadi. (ika/yes)

Edisi : Sabtu, 30 Mei 2015

Hal : 21 & 35